

Peranan Organisasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Disabilitas di Lingkungan Kota Serang

Siti Julaeaha*, Neti Asmiati, Reza Febri Abadi

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten Indonesia

*Corresponding Author: 2287180042@untirta.ac.id

Abstract

Community organization is a forum that has certain characteristics, has a role in the progress of a group or nation, functions as a reservoir and fights for the aspirations of its people. The purpose of this study is to analyze the form of the role of disability community organizations, supporting factors, inhibiting factors, the impact of the role of disability community organizations on welfare. This study uses a qualitative descriptive method, in the city of Serang. The informants of this study were five organizational administrators and five members of the organization. Data collection techniques by observation, interviews, and documentation. The validity of the data using source triangulation and technical triangulation. The results showed that the role of community organizations in the city of Serang consists of a facilitative role, educational role representative role and technical role. The supporting factors for the implementation of the fulfillment of the welfare rights of people with disabilities are found in the motivation and government policies, the inhibiting factors for the fulfillment of the welfare rights of the disabled people are found in the budget and infrastructure, the impact of the role of disability community organizations on welfare, namely that all the welfare rights of the disabled community have not been fulfilled so that people with disabilities have not able to be independent.

Keywords: organizational role; disability; welfare

Abstrak

Oganisasi masyarakat merupakan suatu wadah yang memiliki ciri tertentu, memiliki peran dalam kemajuan suatu kelompok atau bangsa, berfungsi sebagai penampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakatnya. Tujuan dari penelitian ini, untuk menganalisis bentuk peranan organisasi masyarakat disabilitas, faktor pendukung, faktor penghambat, dampak peranan organisasi masyarakat disabilitas terhadap kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, di lingkungan Kota Serang. Informan penelitian ini yaitu lima pengurus organisasi dan lima anggota organisasi. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran organisasi masyarakat di lingkungan Kota Serang terdiri dari peran fasilitatif, peran edukasional, peran representative dan peran teknik. Faktor pendukung pelaksanaan pemenuhan hak kesejahteraan masyarakat disabilitas terdapat pada motivasi dan kebijakan pemerintah, faktor penghambat pemenuhan hak kesejahteraan masyarakat disabilitas terdapat pada anggaran dan sarana prasarana, dampak peranan organisasi masyarakat disabilitas terhadap kesejahteraan yaitu belum terpenuhinya semua hak-hak kesejahteraan masyarakat disabilitas sehingga masyarakat disabilitas belum mampu mandiri.

Kata kunci: peran organisasi; disabilitas; kesejahteraan

Article History:

Received 2022-11-04

Revised 2022-12-13

Accepted 2022-12-18

DOI:

10.31949/educatio.v8i4.3798

PENDAHULUAN

Permasalahan masyarakat perihal pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara tidak hanya kepada masyarakat pada umumnya saja, tetapi juga kepada masyarakat penyandang disabilitas. Masyarakat disabilitas merupakan orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Radissa et al, 2020; Santoso & Apsari, 2017; Sholihah, 2016; Widinarsih, 2019). Dalam kondisi nyata, banyak masyarakat disabilitas yang tidak mendapat pemenuhan terhadap haknya serta kesetaraan dengan masyarakat umum lainnya (Irianto et al, 2020; Sukmawati, 2021). Penyandang disabilitas seringkali dipandang sebagai orang yang tidak produktif (Irwan et al, 2022), yang tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga hak-haknya seringkali terabaikan. Seharusnya penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menerima manfaat seperti orang lain.

Penyandang disabilitas pada dasarnya membutuhkan berbagai intervensi terutama dari pemerintah dan organisasi masyarakat, agar dapat menjalani kehidupan yang layak dalam proses pemenuhan fungsi anggota masyarakat. Pemerintah merumuskan kebijakan melalui undang-undang tentang disabilitas, sebagaimana diatur dalam UU No. 4. Pasal 5 Tahun 1997 Tentang Penyandang Disabilitas, bahwa “Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Selain dalam peraturan tersebut, Pemerintah Indonesia juga merangkum peraturan yang baru dalam UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dimana peraturan mengenai hak-hak Disabilitas tersebut sudah tertuang secara menyeluruh dalam peraturan ini.

Organisasi masyarakat disabilitas yang telah memberikan kontribusi yang sangat aktif kepada masyarakat disabilitas adalah PPDI, GERKATIN dan PERTUNI. Organisasi masyarakat ini bertujuan untuk menciptakan keadaan masyarakat disabilitas menjadi keadaan yang memperjuangkan masyarakat disabilitas dari berbagai aspek kehidupan mulai dari aspek sosial, pendidikan, tenaga kerja, serta kesehatan. Perkembangan organisasi masyarakat tersebut terselenggara untuk melayani kebutuhan dalam segala aspek. Maka dari itu, perlu adanya komunitas yang dapat menampung disabilitas agar mereka dapat saling berkomunikasi dan menyampaikan keinginannya serta dengan adanya komunitas disabilitas ini bisa mewadahi para penyandang disabilitas agar mampu berinteraksi dan menuangkan aspirasinya.

Dari hasil wawancara oleh Peneliti terhadap Ormas disabilitas di Kota Serang, realita yang ada di Kota Serang masih banyak penyandang disabilitas yang belum mandiri karena minimnya pelayanan publik, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mereka peroleh. Dalam permasalahan ini, Peneliti coba untuk mengamati peranan ORMAS Disabilitas seperti persatuan penyandang disabilitas Indonesia (PPDI), gerakan untuk kesejahteraan tunarungu Indonesia (GERKATIN) dan persatuan tunanetra Indonesia (PERTUNI) di lingkungan Kota Serang yang memiliki kewajiban untuk memperjuangkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas di lingkungan Kota Serang. Peranan Ormas tersebut harusnya dapat memberikan pelayanan kesejahteraan bagi masyarakat disabilitas di Kota Serang bisa maksimal. Seperti yang dikemukakan oleh Herdiansyah (2016) bahwa peran organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat sipil yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Namun, sampai saat Peneliti melakukan wawancara, kenyataan di lapangan belum terpenuhi atau kurang maksimal peranan Ormas tersebut. Seharusnya, Ormas-ormas disabilitas terutama PPDI yang memiliki peranan lebih untuk memberikan pelayanan tersebut. Akan tetapi hal-hal seperti tindakan nepotisme ada saja dalam Ormas. Hal ini seperti yang memegang kepengurusan Ormas tersebut adalah Tunadaksa (hambatan fisik dan motorik), pelayanan kesejahteraan yang mereka perjuangkan hanya kepada kaumnya saja. Untuk disabilitas yang lain seakan terabaikan.

Adapun persoalan lain yang terdapat pada Ormas disabilitas ini seperti GERKATIN dan PERTUNI adalah minimnya tanggapan kerja sama dari pihak Pemerintah Kota Serang dalam pelayanan kesejahteraan mereka. Terkadang mereka mencoba untuk melakukan pendekatan lebih kepada Pemerintah seperti Dinas Sosial, namun respon yang mereka dapatkan hanya alibi bahwa tidak adanya anggaran yang dialokasikan kepada Ormas tersebut. Maka Dari persoalan yang ada, maka Peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian terkait peranan organisasi masyarakat disabilitas terhadap kesejahteraan disabilitas di lingkungan kota serang. Penelitian-penelitian sebelumnya yang berupaya meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas pernah dilakukan oleh Cahyani et al. (2021) melalui peran dinas sosial di Kota Semarang, penelitian Rizzana (2022) di Kota Palu, dan penelitian Ardiansyah (2022) di Kota Sumedang,

Jawa Barat. Nopiah & Islami (2022) dalam penelitiannya, melakukan kajian terhadap peran pemberdayaan Ekonomi Digital Difa City Tour (Ojek Difa) terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas di Yogyakarta. Penelitian serupa juga dilakukan Mersi & Chatun (2021) melalui upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas di Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. Perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini akan berupaya melakukan kajian peranan organisasi masyarakat di Kota Serang. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan organisasi masyarakat disabilitas terhadap kesejahteraan disabilitas di lingkungan kota serang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap peranan Organisasi Masyarakat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat disabilitas di Kota Serang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai situasi, meringkas kondisi atau fenomena realita sosial di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Menurut Sugiyono (2016) metode ini berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawan adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juli 2022 di Kota Serang dengan sumber data yaitu organisasi masyarakat disabilitas seperti PPDI, GERKATIN dan PERTUNI di lingkungan Kota Serang.

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan pedoman instrumen observasi yang dikembangkan dari teori Jam Ife dan Frank Tsoriero tentang jenis-jenis peran, UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi masyarakat, dan faktor pendukung dan penghambat pemenuhan hak kesejahteraan, serta Undang-undang No 8 tahun 2016. Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah analisis data dengan pendekatan kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Dalam prosesnya, analisis data dilakukan sejak dikumpulkannya data pertama hingga pengumpulan data selesai dengan perolehan data-data yang dikumpulkan dari lapangan berdasarkan instrumen pengumpulan data yang telah dibuat, yang meliputi instrumen observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk melakukan keabsahan data, dilakukan metode triangulasi. Triangulasi yang digunakan meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dimana triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda-beda dengan menggunakan teknik atau cara yang sama, dalam hal ini dilakukan wawancara terhadap kedua sumber penelitian yaitu pengurus dan anggota organisasi masyarakat disabilitas di lingkungan Kota Serang. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan melakukan cek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu data yang diperoleh dari informan dilakukan pengecekan dengan teknik berbeda menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis penelitian mengenai peranan organisasi masyarakat disabilitas di Kota Serang, dalam pemenuhan hak kesejahteraan anggota disabilitas yang mencakup 4 aspek yaitu, bentuk peranan organisasi masyarakat, faktor pendukung pelaksanaan pemenuhan hak kesejahteraan masyarakat, faktor penghambat pemenuhan hak kesejahteraan masyarakat dan dampak peranan organisasi masyarakat disabilitas. Berikut akan diuraikan satu persatu:

1. Bentuk peranan organisasi masyarakat

Dalam pembentukan sebuah organisasi kemasyarakatan pasti memiliki tujuan dan fungsi. Tujuan dan fungsi organisasi disabilitas di Kota Serang rata-rata terjadi seperti, partisipasi dan pemberdayaan disabilitas, mulai dari melakukan pendataan, pengadaan musyawarah dan bekerjasama dengan pemerintah untuk memberikan pelatihan kepada anggota disabilitas, agar dijadikan modal kehidupannya sehari-hari.

Pelatihan yang diberikan seperti pelatihan servis HP, menjahit, baca tulis braille baik latin maupun arab, musik, dan pijat.

Dalam sebuah organisasi tidak hanya terdapat tujuan dan fungsi saja. Akan tetapi, sebuah organisasi juga memiliki sebuah peran yang sangat penting untuk dilaksanakan demi tercapainya sebuah tujuan dan fungsi tersebut.

a. Peran Fasilitatif.

Peran fasilitatif yang dilakukan oleh organisasi masyarakat disabilitas Kota Serang seperti partisipasi dan pemberdayaan disabilitas, mulai dari melakukan pendataan, pengadaan musyawarah dan bekerjasama dengan pemerintah dalam hal pemberian pelatihan-pelatihan untuk dijadikan modal kehidupannya sehari-hari bagi disabilitas. Diantaranya, pelatihan servis HP, menjahit, baca tulis braille baik latin maupun arab, musik, dan pijat.

Bentuk sarana penyalur kegiatan organisasi disabilitas seperti tenis meja tunanetra, sarana pelatihan baca tulis braille, kesenian atau musik, sarana pelatihan pijat, sekretariat dan ada pula sarana berupa pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada anggota disabilitas harus bekerjasama dengan dinas sosial atau dinas terkait. Bentuk sarana penyalur kegiatan ini belum bisa dikatakan memfasilitasi karena belum adanya tempat khusus untuk menyalurkan hasil pelatihan yang diberikan serta belum terfasilitasinya pelayan publik untuk para penyandang disabilitas tunanetra seperti guiding block. Dengan demikian peran fasilitatif organisasi masyarakat di Kota Serang belum berfungsi dengan baik. Menurut Cahyani et al. (2021) peran fasilitatif dilaksanakan dengan pemberian dorongan atau sebuah motivasi, pemberian jaminan sosial dan rehabilitasi sosial, pemberian dorongan/motivasi biasanya diberikan melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan.

Tujuan dari sarana yang diberikan selain untuk menyalurkan hasil pelatihan, sarana tersebut juga dapat menunjang ekonomi dan kreativitas masyarakat disabilitas, melahirkan prestasi, meningkatkan minat dan bakat masyarakat disabilitas serta kemandirian masyarakat disabilitas.

Dalam hal pelayan publik, organisasi masyarakat disabilitas di Kota Serang selalu menyuarakan kepada dinas-dinas terkait pelayanan publik disabilitas seperti, stasiun kereta api yang memang di Kota Serang ini hanya satu saja yang sudah menyediakan hal tersebut. Akan tetapi, dalam hal pelayanan publik khususnya di Kota Serang belum ramah disabilitas. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat disabilitas yaitu dengan melakukan audiensi kepada pemerintah atau instansi terkait yang memang seharusnya memfasilitasi hak pelayanan publik para penyandang disabilitas serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas dengan mengadakan acara jalan santai menyusuri guiding block yang ada di Kota Serang.

Kemudian dalam peranan tersebut terdapat beberapa kendala, seperti penolakan dari keluarga disabilitas untuk didata atau di publikasikan, jenjang pendidikan, memahami karakter sesama disabilitas dan bersosialisasi di masyarakat secara luas. Dalam musyawarah dan pelatihan terdapat kendala pada anggota itu sendiri, dimana anggota tersebut tidak ada, tidak memperhatikan atau menyimak dengan baik musyawarah serta terkendala pada transportasi.

b. Peran Edukasional

Peran edukasional yang dilaksanakan Organisasi masyarakat disabilitas Kota Serang yaitu Pelayan spiritual kepada masyarakat disabilitas kebanyakan membina dan membimbing dalam bentuk pengajian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan para penyandang disabilitas, berbagi ilmu dan memperingati hari-hari besar Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat Cahyani et al. (2021) yang menyatakan bahwa peran edukasional meliputi peningkatan pengetahuan dan keterampilan, memberikan informasi terkait potensi berpeluang, peningkatan kesadaran masyarakat disabilitas dan pelatihan.

Selain itu, bentuk pelestarian nilai-nilai budaya yang dilakukan organisasi masyarakat disabilitas Kota Serang sampai saat ini belum ada yang melakukan pelestarian budaya. Adapun pelayanan untuk meningkatkan jiwa nasionalisme pada anggota organisasi disabilitas Kota Serang belum sepenuhnya melaksanakan pelayanan tersebut. Dalam hal ini ada yang melaksanakan dengan cara memperingati hari besar

nasional, melakukan perkumpulan didalam organisasi serta bekerjasama dengan pemerintah atau dinas terkait yang memiliki program itu.

c. Peran Representative

Peran representative organisasi masyarakat Kota Serang meliputi Pengoptimalan peran organisasi disabilitas yaitu bekerjasama dengan dinas sosial atau dinas-dinas terkait yang memiliki program pelatihan untuk disabilitas khususnya Kota Serang. Selain itu, tindakan untuk mensosialisasikan disabilitas kepada masyarakat dan memotivasi keluarga yang memiliki anak disabilitas agar tidak minder, meningkatkan mobilitas anggota disabilitas, saling kordinasi terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan serta berkontribusi dengan dinas sosial atau instansi terkait penjadwalan pelatihan yang akan diberikan kepada masyarakat disabilitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Cahyani et al. (2021) yang menyatakan bahwa peran representative yaitu bekerja dalam pembinaan dan pengembangan potensi, tindakan promosi, membuka jaringan kerja dengan pihak lain, melakukan tindakan perlindungan bagi disabilitas terdiskriminasi dan mendapatkan modal usaha

Adapun bentuk partisipasi organisasi masyarakat disabilitas Kota Serang dalam mewujudkan tujuan Negara yaitu dengan memberikan pembekalan ilmu pengetahuan, menyuarakan isu dalam bentuk berkontribusi untuk meningkatkan negara. Selain itu, organisasi memberikan motivasi atau arahan kepada anggotanya untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi seperti mengikuti sekolah paket A, Paket B dan paket C.

Dalam pembinaan organisasi masyarakat disabilitas, ORMAS Disabilitas bekerjasama dengan pemerintah atau dinas terkait untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat disabilitas dan melakukan pengangkatan peserta pelatihan menjadi instruktur pelatihan.

d. Peran Teknik

Organisasi masyarakat disabilitas Kota Serang melaksanakan peran tersebut seperti menampung aspirasi masyarakat disabilitas dengan melakukan penyaluran aspirasi pada saat kegiatan bersama. Kemudian, aspirasi tersebut akan disampaikan kepada pemerintah atau instansi yang dituju secara bersama-sama, untuk mencari solusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat disabilitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Cahyani et al. (2021) yang menyatakan peran teknik yaitu kemampuan dalam input dan analisis data dan kreativitas pegawai dalam menciptakan suasana nyaman.

Adapun pemberdayaan masyarakat disabilitas di Kota Serang selain memberikan pelatihan, organisasi juga memberikan motivasi untuk memiliki keterampilan yang lebih baik dalam kehidupannya. Akan tetapi, bentuk pemberdayaan tersebut hampir semua organisasi disabilitas hanya memberikan sebuah pelatihan tanpa disediakan tempat untuk memberdayakan masyarakat disabilitas.

2. faktor pendukung pelaksanaan pemenuhan hak kesejahteraan masyarakat

Faktor pendukung pelaksanaan pemenuhan hak kesejahteraan masyarakat disabilitas di lingkungan Kota Serang, dengan memberikan motivasi kepada anggota disabilitas terkait dengan hak kesejahteraan anggota. Selain itu, organisasi masyarakat disabilitas juga mengayomi anggota dan menampung aspirasi hak secara personal, untuk disampaikan kepada instansi-instansi pemerintah yang memiliki kebijakan dalam menangani kesejahteraan sosial, hal ini bertujuan agar anggota organisasi tersebut bisa diberdayakan. Pemberian motivasi dan kebijakan pemerintah ini menjadi faktor pendukung dalam pemenuhan hak kesejahteraan masyarakat (Margayaningsih, 2018)

Kemudian kebijakan yang menjadi faktor pendukung peran organisasi masyarakat disabilitas, dalam hal ini di lingkungan Kota Serang, kebijakan pemerintah Kota Serang dalam hal tersebut sudah ada dan diterbitkan seperti, PERDA dan PERWAL Kota Serang hanya saja dalam mengimplementasikan hasil kebijakan tersebut belum terlaksana bahkan masih banyak disabilitas yang belum mengetahui isi dari PERDA dan PERWAL tersebut, karena kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat disabilitas terkait dengan kebijakan yang telah dibuat. Maka dari hasil analisis peneliti, dapat diasumsikan bahwa, kebijakan pemerintah yang menjadi faktor pendukung, sebenarnya bila diimplementasikan maka menjadi faktor pendukung, akan tetapi lantaran tidak adanya implementasi dari kebijakan tersebut, sehingga kebijakan pemerintah yang menjadi faktor pendukung malah berbalik menjadi faktor penghambat dalam

memenuhan hak-hak kesejahteraan masyarakat disabilitas. sebagaimana yang diungkapkan oleh Dye (2013) dan Soetari (2014) kebijakan pemerintah adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan bermanfaat bagi masyarakat sehingga tidak menimbulkan kerugian. Maka, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan dan mensosialisasikan

3. faktor penghambat pemenuhan hak kesejahteraan masyarakat

Dalam hal peranan organisasi masyarakat disabilitas di Kota Serang, tidak terlepas dari faktor-faktor tersebut. Faktor penghambat pemenuhan hak kesejahteraan masyarakat disabilitas di lingkungan Kota Serang terdapat pada permasalahan keuangan yang memang belum memiliki sumber pendanaan secara independen dan masih bergantung pada bantuan dari pemerintah maupun donatur.

Adapun faktor lain terdapat pada sarana dan prasarana dalam menunjang pemenuhan hak kesejahteraan masyarakat disabilitas. Dimana, sarana prasarana ini merupakan elemen penting dalam menunjang pemenuhan hak kesejahteraan masyarakat disabilitas, seperti yang diungkapkan oleh Ananda dan Banurea (2018) bahwa sarana prasarana merupakan elemen penting yang mendukung dan memfasilitasi seluruh rencana kegiatan dapat dilaksanakan pada pelaksanaan kegiatan. Sarana dan prasana penunjang kegiatan organisasi masyarakat disabilitas di lingkungan Kota Serang terhadap anggota, dinilai belum optimal, terutama pada pelayanan publik yang memang belum ramah disabilitas, sarana dalam menunjang kegiatan disabilitas di Kota Serang ini belum ada. Selain itu, belum adanya pendampingan yang cukup bagi penyandang disabilitas Tunanetra maupun JBI untuk penyandang disabilitas Tunarungu dan tidak adanya tempat untuk menampung anggota dalam mengembangkan kemampuannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Margayaningsih (2018) yang menyatakan bahwa faktor penghambat dalam pemenuhan hak kesejahteraan masyarakat meliputi anggaran dan sarana prasarana.

4. Dampak peranan organisasi masyarakat

Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan, dampak tersebut bisa terjadi jika pelaksanaan dan pemenuhan hak tersebut dilakukan maka dapat berdampak positif sedangkan apabila tidak dilakukan bisa berdampak negatif terhadap masyarakat. Dampak yang terjadi seperti, tindakan pemenuhan hak kependudukan masyarakat disabilitas Kota Serang dengan melakukan pembuatan KTP dan KK, yang bekerjasama dengan CAPIL, agar masyarakat disabilitas dapat diberikan kemudahan dan diprioritaskan.

Adapun dampak dalam pemenuhan hak kesehatan dan gizi masyarakat disabilitas Kota Serang, organisasi masyarakat disabilitas hanya melakukan sebuah pendataan dan bekerjasama dengan dinas sosial Kota Serang, akan tetapi, dalam pembuatan BPJS itu tersendiri belum adanya kemudahan atau akses khusus bagi para penyandang disabilitas. Dalam hal pemenuhan hak kesehatan dan gizi masyarakat di Kota Serang belum optimal sehingga dalam pemenuhan hak tersebut masih ada yang harus mengurus secara mandiri tanpa adanya kerjasama.

Dalam pemenuhan hak pendidikan, organisasi masyarakat disabilitas bekerjasama dengan dinas pendidikan Kota Serang agar masyarakat disabilitas yang tertinggal dalam pendidikan bisa mengikuti sekolah paket. Selain itu, organisasi juga merekomendasikan kepada masyarakat yang memiliki keluarga disabilitas untuk bersekolah di sekolah khusus atau sekolah inklusi. Adapun yang memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan, pembekalan pengetahuan, serta mengupayakan beasiswa bagi siswa siswi disabilitas.

Dampak selanjutnya yaitu, tindakan dalam pemenuhan hak ketenagakerjaan organisasi masyarakat disabilitas. Dimana dalam tindakan tersebut dinilai belum optimal, karena masih kurangnya peluang atau kerjasama terhadap instansi-instansi lain. Dalam pemenuhan hak ini harus adanya pemaksaan terhadap pemerintah agar pemerintah lebih memperhatikan semua para penyandang disabilitas di Kota Serang.

Tindakan organisasi masyarakat disabilitas Kota Serang untuk memenuhi hak taraf dan pola konsumsi yaitu dengan melakukan penyaluran bahan pokok atau logistik dan bantuan tunai bagi masyarakat disabilitas yang bekerjasama dengan instansi terkait dan para donator yang peduli terhadap disabilitas. Kemudian tindakan dalam pemenuhan hak tempat tinggal, memang belum dapat memenuhi hal tersebut, meskipun organisasi masyarakat juga bekerjasama dengan dinas sosial Kota Serang.

Adapun tindakan dalam mengurangi kemiskinan masyarakat disabilitas Kota Serang mulai dari melakukan pendataan kemudian data tersebut disalurkan kepada dinas yang berkewajiban untuk

memenuhinya. Adapun organisasi yang melakukan pengajuan modal usaha kepada instansi atau koperasi sehingga masyarakat disabilitas memiliki ekonomi dan penghasilan yang lebih baik. Selain itu, memberikan informasi mengenai peluang pekerjaan.

Dampak pemenuhan hak sosial disabilitas di Kota Serang, organisasi masyarakat disabilitas mensosialisasikan keberadaan penyandang disabilitas dan berbagai aksesnya kepada masyarakat umum dan berinteraksi dengan masyarakat umum. Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh organisasi masyarakat disabilitas untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat disabilitas di Kota Serang, seperti memberikan pelatihan, mengupayakan lowongan pekerjaan, mengusahakan memberikan sarana prasarana yang menunjang baik kegiatan organisasi maupun dalam pengembangan skil masyarakat disabilitas, dengan bekerjasama terhadap instansi-instansi terkait; serta meningkatkan relasi terhadap instansi terkait.

KESIMPULAN

Bentuk-bentuk peran organisasi masyarakat disabilitas di Kota Serang, terjadi dalam 4 bentuk peran seperti, peran fasilitatif (memberikan atau memfasilitasi kegiatan disabilitas dan memberikan pengembangan skil individu disabilitas), peran edukasional (meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota disabilitas yang menunjang kehidupan dan juga membantu pemenuhan hak kesejahteraan anggota disabilitas), peran representatif (bekerjasama dengan pemerintah untuk memberikan pembinaan dan pengembangan potensi anggota disabilitas), dan peran teknik (landasan atau bentuk pelayanan organisasi masyarakat kepada anggotanya dan memberikan kenyamanan serta memotivasi anggota disabilitas agar dapat mandiri dan juga berperan aktif dalam pemenuhan hak-haknya). Selain itu, faktor pendukung pelaksanaan pemenuhan hak kesejahteraan masyarakat disabilitas Kota Serang yaitu memberikan motivasi dan kebijakan pemerintah. Adapun Faktor penghambat pemenuhan hak kesejahteraan masyarakat terdapat pada permasalahan keuangan, sarana dan prasana dalam menunjang pemenuhan hak kesejahteraan masyarakat disabilitas. Kemudian, dampak peranan organisasi masyarakat disabilitas terhadap kesejahteraan yaitu belum terpenuhinya semua hak-hak kesejahteraan masyarakat disabilitas. Karena, kurang optimal peran organisasi masyarakat disabilitas dalam memperjuangkan hak-hak kesejahteraan disabilitas, sehingga masyarakat disabilitas belum mampu memenuhi haknya secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R., & Banurea, O. K. (2017). *Manajemen sarana dan prasarana pendidikan*. CV. Widya Puspita: Medan
- Ardiansyah, M. (2022). *Peran pemberdayaan Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang Disabilitas di Kabupaten Sumedang* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Cahyani, M. E., Sulandari, S., & Hariani, D. (2021). Peran Dinas Sosial Kota Semarang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Disabilitas. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 224-237.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy*. Pearson.
- Herdiansah, A. G. (2016). Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. *Sosioglobak: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 1(1), 49-67.
- Irianto, M. F., Setiyowati, S. W., & Hidayah, S. A. R. (2020). Pengembangan Produk Kopi Herbal Olahan Desa Inklusif Guna Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Disabilitas Di Desa Bedali Lawang Kabupaten Malang. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(1), 575-579.
- Irwan, M., Anggreni, A., Sunita, J., & Suhdi, H. (2022). Life Skills Education Through Non-Formal Education For People With Physical Disabilities. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 10(2), 235-242.

- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Publiciana*, 11(1), 72-88.
- Mersi, H. V. Y., & Chatun, S. (2021). Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa: Studi Kasus Penyandang Disabilitas Forum Peduli Kasih Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. *Jurnal Politiconesia*, 10(2), 55-674.
- Nopiah, R., & Islami, P. A. (2022). Peran Pemberdayaan Ekonomi Digital Difa City Tour (Ojek Difa) Terhadap Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta. *Convergence: The Journal of Economic Development*, 4(1), 1-18.
- Raco, R. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Radissa, V. S., Wibowo, H., Humaedi, S., & Irfan, M. (2020). Pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas pada masa pandemi COVID-19. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 61-69.
- Rizzana, A. R. A. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Disabilitas Dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. *Journal of Islamic Community and Development*, 1(1), 109-132.
- Santoso, M. B., & Apsari, N. C. (2017). Pergeseran paradigma dalam disabilitas. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2), 166-176.
- Sholihah, I. (2016). Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 2(2).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. Ke-23. Bandung: Alfabeta.
- Sukmawati, N. (2021). Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas. *Media of Law and Sharia*, 2(4), 383-399.
- Soetari, E. (2014). *Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang disabilitas di indonesia: perkembangan istilah dan definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2), 127-142.